



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**SENIN, 23 APRIL 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Diduga Banyak Kuitansi Palsu

**BENGKULU, BE** - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu melakukan penyelidikan dugaan temuan kerugian negara pada sejumlah kegiatan perjalanan dinas di lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah (Benteng) tahun 2016.

► *Baca Diduga ... Hal 15*



**Kita melakukan penyelidikan dugaan temuan BPK di lingkungan Pemkab Benteng. Dari kerugian itu baru sekitar 70 persen dikembalikan, sisanya tidak bisa dipertanggung jawabkan. Kita menduga banyak kuitansi dipalsukan"**

**Henri Nainggolan SH MH**

*Aspidsus Kejati Benakulu*

Kerugian negara tersebut berdasarkan audit telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nominalnya cukup fantastis, sekitar Rp 9 miliar.

Kejati Bengkulu turun tangan mengusut hal ini karena dari jumlah temuan baru sekitar 70 persen dikembalikan. Sisanya tidak bisa dipertanggung jawabkan. Penyelidikan terkait temuan tersebut diungkapkan Kajati Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol SH MH melalui Aspidsus Kejati Bengkulu, Henri Nainggolan SH MH.

"Kita melakukan penyelidikan dugaan temuan BPK di lingkungan Pemkab Benteng.

Dari kerugian itu baru sekitar 70 persen dikembalikan, sisanya tidak bisa dipertanggung jawabkan. Kita menduga banyak kuitansi dipalsukan" jelas Aspidsus.

Masih dikatakan Aspidsus, BPK sudah memberikan batas waktu untuk segera mengembalikan kerugian negara. Tetapi sampai batas waktu habis, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak juga mengembalikan kerugian negara tersebut. Tidak heran jika akhirnya kasus tersebut akhirnya diselidiki Kejati Bengkulu.

Sejauh ini, Kejati Bengkulu masih mengumpulkan petunjuk

dan keterangan sejumlah saksi yang mengetahui dan berkaitan dengan kasus tersebut. Bahkan besar kemungkinan Kejati Bengkulu bakal memanggil Bupati Benteng untuk mengetahui bagaimana bisa kerugian negara tersebut tidak dikembalikan.

"Pasti diperlukan (keterangan bupati), karena ini kan satu kapal, masak nahkoda sama toke tidak ditanya," imbuh Aspidsus.

Terkait pengembalian yang sudah dilakukan tidak akan menghentikan proses hukum.

Data terhimpun, temuan BPK Rp 9 miliar tersebut dari perjalanan dinas di Sekertariat

Daerah Kabupaten (Setdakab), Sekertariat Dewan (Setwan) dan dan sejumlah OPD di Pemkab Benteng. Pada tahap penyelidikan ini Kejati Bengkulu masih menyelidiki temuan tersebut terdapat pada OPD apa saja.

Sehingga nanti bisa terinci OPD mana saja yang tidak bisa mempertanggung jawabkan kerugian negara tersebut.

"Yang jelas sudah ada batas waktu, tetapi kita masih menyelidiki temuan tersebut di bidang apa saja, nanti kan bisa terlihat bidang ini tidak bisa mempertanggung jawabkan sekian," pungkas Aspidsus. (167)